

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang memiliki sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya yang melimpah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tercapainya kesejahteraan penduduk dapat digambarkan oleh kenaikan pendapatan per kapita secara nasional yaitu Produk Domestik Bruto Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator perekonomian yang dianggap sebagai ukuran yang baik untuk menilai perekonomian suatu negara.

PDB mampu untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai mata uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian nasional. Nilai dari PDB mengandung dua macam persepsi yaitu sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa dalam perekonomian. Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat secara keseluruhan selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut. Sementara itu, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau warga negara tersebut yang berada di luar negeri tidak dihitung ke dalam Produk Domestik Bruto.

Untuk meningkatkan PDB, maka pemerintah harus memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan sebaik mungkin. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, aliran modal yang ditanam diberbagai sektor merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi negara Indonesia, karena dengan adanya aliran modal yang masuk ke Indonesia akan mampu memudahkan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Salah satu yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dll. Investasi swasta juga diharapkan mampu berkembang lebih pesat lagi agar pertumbuhan ekonomi mampu bertahan. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu investasi swasta yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia dengan menanamkan modalnya kedalam negeri. Keberadaan penanaman modal dalam negeri sampai saat ini terus mengalami peningkatan, sehingga diharapkan juga mampu meningkatkan pendapatan nasional melalui beberapa langkah dan arahan dari investor yang bekerjasama dengan pemerintah.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia harus terus di tingkatkan guna mendorong peningkatan pembangunan ekonomi nasional yang bersumber dari investor dalam negeri melalui kerjasama dengan pemerintah pusat. Selain penanaman modal dalam negeri, Penanaman Modal Asing (PMA) juga ikut serta dalam meningkatkan pendapatan nasional. Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui sumbangan modal dan investasi fisik seperti pemasukan dana, pembukaan lapangan pekerjaan dengan membuka unit usaha, dan juga tambahan sumberdaya dalam negeri.

Dari Tabel 1 di bawah, dapat dilihat bahwa PDB Indonesia setiap tahunnya secara terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 PDB Indonesia sebesar Rp 6.864.133,1 Milyar rupiah, dan terus meningkat sampai pada tahun 2020 sebesar Rp 15.434.151,8 Milyar rupiah. Peningkatan PDB tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam memangkas birokrasi di Indonesia khususnya dalam proses masuknya investasi. Investasi merupakan salah satu sumber dana masuk yang perlu di pertimbangkan, karena dampaknya akan langsung mengarah pada peningkatan PDB Indonesia melalui pembukaan lapangan kerja baru yang tentunya akan menyerap tenaga kerja.

Tabel 1 Perkembangan PDB, Pengeluaran Pemerintah, PMDN, dan PMA di Indonesia Tahun 2010–2020.

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp Milliar)	PMDN (Rp Milliar)	PMA (Juta US\$)	PDB (Rp Milliar)
2010	1.042.117	60.626,3	16.214,8	6.446.851,9
2011	1.294.999	76.000,7	19.474,5	7.419.187,1
2012	1.491.410	92.182,0	24.564,7	8.230.925,9
2013	1.650.564	128.150,6	28.617,5	9.087.276,5
2014	1.777.183	156.126,3	28.529,6	10.569.705,3
2015	1.806.515	179.465,9	29.275,9	11.526.332,8
2016	1.864.275	216.230,8	28.964,1	12.401.728,5
2017	2.007.352	262.350,5	32.239,8	13.589.825,7
2018	2.213.118	328.604,9	29.307,9	14.838.756,0
2019	2.309.287	386.498,4	28.208,7	15.832.657,2
2020	2.739.166	413.535,5	28.666,2	15.434.151,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang dapat dilihat dari dokumen APBN untuk tingkat Nasional (Indonesia) dan APBD untuk tingkat

daerah (Provinsi dan daerah dengan cakupan wilayah yang lebih kecil seperti Kabupaten).

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat pergerakan pengeluaran pemerintah yang mengalami peningkatan secara terus menerus. Dimana pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1.042.117,2 Milyar rupiah dan terus meningkat hingga dimana pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah mencapai Rp 2.739.165,9 Milyar rupiah. Meningkatnya pengeluaran pemerintah disetiap tahun, di iringi dengan meningkatnya PDB Indonesia ditiap tahunnya.

Selain pengeluaran pemerintah, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi PDB Indonesia, yaitu PMDN. PMDN merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk membuka usaha dalam wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan menggunakan modal dalam negeri. Terdapat perbedaan mendalam pada suatu usaha atau perusahaan PMDN dimana perusahaan PMDN memperoleh fasilitas dari pemerintah baik berupa pajak, pembebasan, dan keringanan bea masuk atas kegiatan impor yang dilakukan pihak atau perusahaan PMDN, dan penyusutan yang di percepat. Salah satu tujuan pemerintah dalam memberikan fasilitas bagi perusahaan PMDN adalah agar investor-investor dalam negeri tertarik dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berharap PMDN akan mengalami peningkatan serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa PMDN di Indonesia pada tahun 2010 terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018. Dimana PMDN tahun

2010 sebesar 60.626,3 Milyar rupiah yang kemudian ditahun berikutnya PMDN terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2020 PMDN mencapai 413.535,5 Milyar rupiah. Dimana peningkatan PMDN diikuti dengan peningkatan PDB Indonesia.

Selain pengeluaran pemerintah dan PMDN, PMA juga merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, oleh sebab itu pemerintah menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat realisasi PMA di Indonesia. Pada tahun 2010 sampai 2015 PMA di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010 PMA sebesar 16.214,8 Juta US\$ yang terus meningkat sampai pada tahun 2015 menjadi 29.275,9 Juta US\$. Namun pada tahun 2016 PMA mengalami penurunan sehingga pada tahun 2016 PMA sebesar 28.964,1 Juta US\$. Kemudian pada tahun 2017 PMA kembali mengalami peningkatan. Sehingga pada tahun 2017 PMA di Indonesia menjadi 32.239,8 Juta US\$. Namun pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020, PMA di Indonesia mengalami penurunan karena wabah virus yang melanda negara-negara didunia. PMA ditahun 2018 sebesar 29.307,9 Juta US\$ dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 28.666,2 Juta US\$.

Sejalan dengan berbagai fenomena yang telah dibahas di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa data perekonomian dengan mengajukan judul

penelitian **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PMDN, dan PMA Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2000–2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia tahun 2000–2020?
2. Bagaimanakah pengaruh PMDN terhadap PDB di Indonesia tahun 2000–2020?
3. Bagaimanakah pengaruh PMA terhadap PDB di Indonesia tahun 2000–2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia tahun 2000–2020.
2. Menganalisis pengaruh PMDN terhadap PDB di Indonesia tahun 2000–2020.
3. Menganalisis pengaruh PMA terhadap PDB di Indonesia tahun 2000–2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang berhubungan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah, PMDN, PMA terhadap PDB di Indonesia.
2. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengeluaran pemerintah, PMDN dan PMA terhadap PDB di Indonesia.
3. Bagi mahasiswa dan bagi pembaca, untuk mengembangkan wawasan mahasiswa dan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Bruto

2.1.1 Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Dalam hal ini, semakin besar PDB pada suatu negara maka kinerja perekonomian di negara tersebut dianggap semakin baik.

Mankiw dalam Suhendra & Irawati (2016:259) menyatakan bahwa:

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu tahun. PDB juga dapat diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang di produksi dalam sebuah Negara pada suatu periode.

Semakin besar Produk Domestik Bruto suatu negara, maka tingkat perekonomian di negara tersebut dianggap semakin baik, karena PDB merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Kegiatan perekonomian di suatu negara akan menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negaranya, perusahaan negara dan perusahaan swasta.

Kunawangsih dalam Mubarok (2014:5) mengatakan:

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara, baik yang dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan maupun warga negara asing yang bekerja di wilayah

tersebut, jumlah PDB dalam suatu negara menggambarkan kemampuan atau pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut.

2.1.2 Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam suatu perekonomian terdapat salah satu konsep pendapatan nasional yang di tunjukkan dalam statistika Indonesia yang merupakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang di hitung oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Mankiw, Quah & Wilson (2013:22) mengatakan:

PDB terdiri atas empat komponen pengeluaran, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi meliputi pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga dengan pengecualian pembelian rumah baru. Investasi meliputi pembelanjaan peralatan dan struktur baru, termasuk pembelian rumah baru oleh rumah tangga. Belanja pemerintah meliputi pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. ekspor neto sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

2.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membiayai suatu kegiatan yang dilakukan pada suatu negara dengan tujuan untuk melaksanakan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer.

Asahdi & Musnadi (2015:66) mengatakan:

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan.

2.2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka anggaran pengeluaran pemerintah yang harus membiayai barang dan jasa tersebut agar terlaksananya suatu kebijakan. Ada beberapa ahli ekonomi yang mengemukakan teori-teori tentang pengeluaran pemerintah.

Teori Batas Kritis Collin Clark dalam Arofah, N. D. (2017:29):

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Permintaan agregat merupakan nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk barang dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian meningkatnya pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan permintaan pada seluruh jenis produk barang dan jasa. Naiknya permintaan tersebut akan sejalan dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto.

Menurut Mankiw dalam Sitaniapessy, H. A. (2013:40):

Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko dan Furtasan dalam Bastias, D. D., & Evi Yulia, P (2010:48):

Pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, (1) pengeluaran yang "*self-liquidatin*" sebagian atau seluruhnya, yang artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang atau jasa yang bersangkutan, (2) pengeluaran yang "*reproduktif*", yang artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, (3) pengeluaran yang "*tidak self-liquidatin*" maupun dan "*tidak reproduktif*" yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, obyek-obyek tourisme dan sebagainya, (4) pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik, (5) pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang. Macam-macam pengeluaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat, kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, ada urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi perkembangan demokrasi, pemborosan dan korupsi, pembangunan ekonomi, program kesejahteraan sosial, serta perubahan iklim.

2.3 Investasi

2.3.1 Pengertian Investasi

McEachern (2000:147) mengatakan:

Investasi adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produk saat ini yang tidak digunakan untuk konsumsi saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru.

Nurkse dalam Palupy, E. H & Basuki, U. M (2019:67) mengatakan bahwa:

Investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan tak berujung pangkal (*virvicious circle*). Rendahnya investasi yang dikarenakan terbatasnya tingkat tabungan menyebabkan stok modal berkurang. Hal tersebut berdampak pada penurunan produktivitas suatu negara yang pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga menurun termasuk didalamnya pendapatan negara. Sehingga berakibat pada rendahnya kemampuan untuk akumulasi tabungan dan kembali lagi pada terbatasnya investasi, begitupun sebaliknya. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Bruto yang tidak bisa dipisahkan oleh adanya peningkatan investasi. Karena disamping mendorong *output* secara signifikan, investasi juga meningkatkan permintaan *input* yang kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Yuliana (2019:29) mengatakan bahwa: “Investasi merupakan salah satu variabel dalam makroekonomi yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi”.

Sukirno (2016:121) mengatakan bahwa:

Investasi merupakan pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal serta perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan masuknya investasi secara langsung ke suatu negara akan menambah modal dinegara tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila kegiatan investasi ke suatu negara berlangsung secara terus menerus dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang daya memiliki daya saing, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok modal yang ada. Investasi akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi indonesia, semakin tinggi tingkat investasi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Motif utama suatu negara mengundang investasi untuk mengalih potensi kekayaan alam dan sumberdaya lainnya dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi. Kenyataan ini disebabkan karena investasi domestik maupun asing akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi didaerah terdiri dari investasi pemerintah dan

investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di suatu negara. Investasi merupakan faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi.

Teori Mankiw (2007:476) mengatakan bahwa:

Investasi adalah komponen Produk Domestik Bruto yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Investasi memainkan peranan penting tidak hanya pada pertumbuhan jangka panjang namun juga pada siklus bisnis jangka pendek karena investasi merupakan unsur produk domestik bruto yang paling sering berubah.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di suatu negara. Investasi merupakan faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rostow dan Harrod-Domar dalam Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A (2016:110):

Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan.

2.3.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal

dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri juga merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta.

Menurut UU No. 25 Tahun 1997 sebagaimana dikutip oleh Putra (2010:43), menyebutkan bahwa tujuan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dan yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Disatu pihak, ia mencerminkan permintaan efektif, dilain pihak ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan tenaga kerja.

Menurut Tambunan dalam Syahrani (2011:27):

Didalam neraca nasional atau struktur produk domestik bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan

modal tetap domestik (*Domestic Fixed Capital Formation*). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat didalam ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (*sustainable development*). Salah satu indikator keberhasilan adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata per tahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya untuk mendukung penyiapan sumberdaya manusia, diperlukan yang disebut dana investasi.

2.3.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produk atau jasa. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan.

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1, Tentang Penanaman Modal dalam Sari, Oktalina & Tigor (2021:71):

Penanaman modal asing merupakan aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya maupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Selanjutnya dijelaskan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Pemerintah selalu mengupayakan arus modal masuk ke Indonesia semakin besar, ini diharapkan agar sesuai dengan semakin meningkatnya dana yang di butuhkan untuk pembangunan, terutama untuk pembangunan di bidang ekonomi.

Sesuai dengan kebutuhan dana pembangunan tersebut, maka pemerintah selalu berusaha untuk menarik dana investor asing dengan memberikan berbagai kemudahan melalui berbagai kebijakan.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang Penanaman Modal Asing yaitu UU no.1 Tahun 1967, sebagai berikut:

1. UU ini dengan jelas tidak mengatur perihal kredit atau peminjaman modal, melainkan hanya mengatur tentang Penanaman Modal Asing.
2. Dengan demikian memberi kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sebelumnya
3. Penanaman modal secara langsung dalam hal ini bukan hanya modal tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia dan sejauh mana kebutuhannya tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Penggunaan kredit dan resikonya ditanggung oleh investor tersebut.

Sesuai apa yang telah di kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru cenderung meningkatkan kesempatan kerja dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan modal asing di Indonesia cenderung menaikkan tingkat produktivitas, pendapatan, dan pekerjaan nasional yang nantinya akan mengarah pada upah riil buruh yang semakin tinggi, menurunnya harga bagi konsumen dan naiknya standar kehidupan mereka.

2.4 Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen

2.4.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDB

Jhingan (2010:388) mengatakan bahwa:

Peranan pengeluaran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi terletak di dalam laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta, dan dalam mewujudkan keseimbangan regional didalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah untuk overhead sosial dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas perekonomian. Jika negara mulai melaksanakan pekerjaan umum seperti pembangunan jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan itu akan memberikan kesempatan kerja kepada jutaan pengangguran. Penyediaan seperti itu membantu meningkatkan produksi, perdagangan dan usaha bisnis.

Dari hasil pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDB.

Aritonang (2019:33) mengatakan:

Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dan tergantung dari besarnya penerimaan pemerintah. apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pencerminan pengeluaran pemerintah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah suatu negara, semakin besar pula pendapatan nasional negara tersebut.

2.4.2 Hubungan PMDN dengan PDB

Penanaman modal dalam negeri adalah suatu kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan hal penting dalam upaya pembangunan ekonomi nasional.

Nuritasari (2013:460) mengatakan bahwa:

Perekonomian negara berkembang memerlukan peran investasi untuk menunjang kinerja perekonomiannya. Salah satunya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dananya bersumber dari dalam negeri. Peran dari PMDN tidak hanya sebagai pembentukan modal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Peran PMDN sebagai salah satu instrument dari investasi sangat dibutuhkan bagi negara berkembang, sehingga berdampak positif terhadap PDB suatu negara.

2.4.3 Hubungan PMA dengan PDB

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan di suatu negara oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing. Sama seperti PMDN, PMA juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Menurut Teori Harrod-Domard dalam Sutjipto & Puspitasari (2016:45):

Untuk meningkatkan laju perekonomian dibutuhkan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut. Dengan penanaman modal yang semakin besar maka akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya PDB dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Dapat disimpulkan penanaman modal asing memiliki hubungan positif terhadap PDB.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya terkait judul skripsi ini, yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam menyusun skripsi ini. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh:

1. Penelitian Mutia, K. A., & Indrawati, L. R. (2019:118) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2004-2018”.

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia”

2. Penelitian Jufrida, F., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2016:67) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

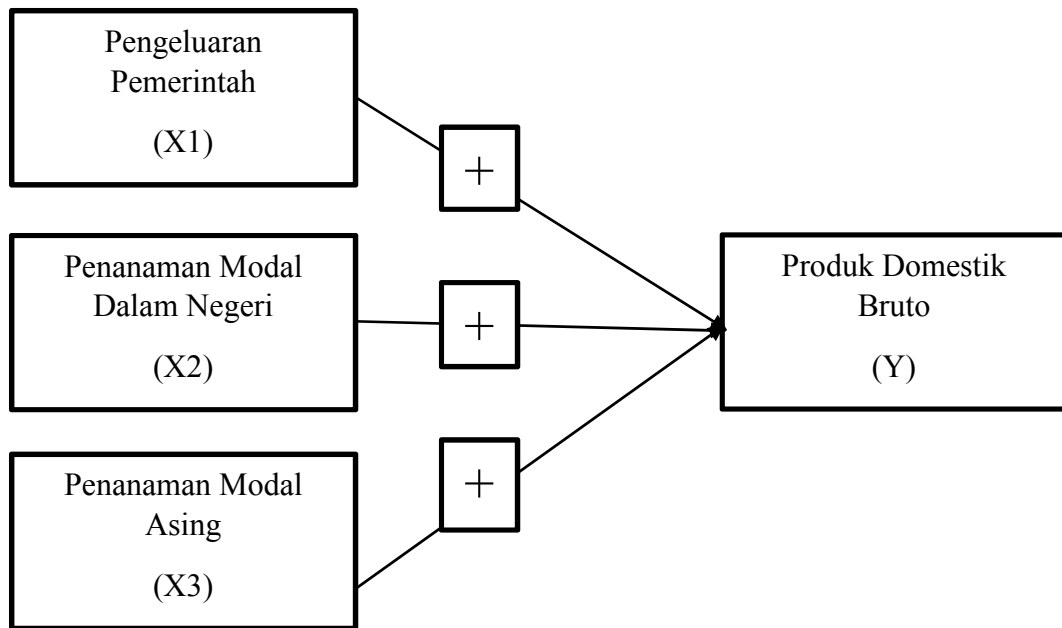
“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia”.

3. Penelitian Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020:143) dengan judul “Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia”.

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun investasi dalam negeri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi”.

2.6 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini, kerang pemikiran terdiri dari 3 variabel yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, antara lain Pengeluaran Pemerintah, PMDN, dan PMA. Kerangka pemikiran dapat dilihat dari skema berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2000–2020.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2000–2020.
3. Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2000–2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah di negara Indonesia, dengan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2000–2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2000–2020 yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Adapun data yang digunakan adalah:

- a. Data Produk Domestik Bruto (PDB)
- b. Data Pengeluaran Pemerintah
- c. Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- d. Data Penanaman Modal Asing (PMA)

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Ekonometrika sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} + \varepsilon_i; \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

dimana:

Y = Produk Domestik Bruto (Miliar Rupiah/Tahun)

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi (statistik)

X_{1i}	= Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah/Tahun)
X_{2i}	= Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar Rupiah/Tahun)
X_{3i}	= Penanaman Modal Asing (Juta USD/Tahun)
ε_i	= galat (<i>error term</i>)

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini meliputi pengujian hipotesis secara parsial (uji-t), pengujian secara serempak (uji-f), dan koefisien determinasi R^2 .

3.4.2 Uji Secara Individu (uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing) secara parsial berpengaruh nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, maka dilakukan pengujian uji-t pada taraf nyata $\alpha = 5\%$.

1. Pengeluaran Pemerintah (X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDB di Indonesia.

$H_1 : \beta_1 > 0$ Artinya, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah:

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$ = Koefisien regresi (statistik)

β_1 = Parameter

$S(\hat{\beta}_1)$ = Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, artinya Pengeluaran Pemerintah di Indonesia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (X2)

$H_0: \beta_2 = 0$ Artinya, PMDN tidak berpengaruh terhadap PDB di Indonesia.

$H_1 : \beta_2 > 0$ Artinya, PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah:

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$ Koefisien regresi (statistik)
 β_2 = Parameter
 $S(\hat{\beta}_2)$ = Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 di terima dan H_1 di tolak, artinya Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.

3. Penanaman Modal Asing (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ Artinya, PMA tidak berpengaruh terhadap PDB di Indonesia.

$H_1 : \beta_3 > 0$, Artinya, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah:

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$ Koefisien regresi (statistik)
 β_3 = Parameter
 $S(\hat{\beta}_3)$ = Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_1 di terima, artinya Penanaman Modal Asing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Uji-t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai *probability* $< \alpha$, maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji-t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0.05\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0.05\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.5 Uji Secara Simultan (uji-F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji-F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak.

Adapun langkah-langkah pengujian uji-F sebagai berikut:

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti variabel bebas secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i$ tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$ berarti variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator ($k-1$) dan df untuk denominator ($n-k$).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah:

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR	= Jumlah Kuadrat Regresi
JKG	= Jumlah Kuadrat Galat
K	= Banyaknya Koefisien Regresi
n	= Banyaknya Sampel

Uji-F (Uji Simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji-F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.6 Uji Kebaikan Suai (R^2)

Uji Kebaikan Suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan suai, model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel-variabel tak bebas yang dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ $R^2 \rightarrow 1$,

artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan aktualnya.

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:103):

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

3.7.2 Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin Watson (uji D-W). Uji D-W hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*First order autirrelation*) dan memasyarakatkan intersep (konstanta) dalam model regresi tidak ada variabel lagi diantara variabel independen, dilakukan dengan membandingkan DW_{hitung} dengan DW_{tabel} . Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien. Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan:

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Nodesicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Nodesicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Jika hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson jatuh pada bagian tidak ada keputusan atau *no-desicion* maka harus dilakukan uji lanjutan dengan statistik non-parametrik menggunakan uji runs (*Runs Test*).

3.7.3 Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji-t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Uji Statistik

Untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Galat (residu) menyebar normal

H_1 : Galat tidak menyebar normal

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti galat menyebar tidak normal
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka galat menyebar normal

3.8 Definisi Operasional Variabel

1. PDB (Y)

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran dari pendapatan riil Indonesia yang diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang diakumulasikan dalam 1 periode tertentu. Cakupan PDB yang digunakan adalah PDB atas harga berlaku (ADHB). Data PDB diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2000-2020. Satuan dari variabel PDB dinyatakan dalam Milyar Rupiah/Tahun.

2. Pengeluaran Pemerintah (X1)

Pengeluaran Pemerintah merupakan total pengeluaran atau belanja pemerintah Indonesia, yang dituang dalam APBN untuk pengeluaran pusat dan APBD untuk pengeluaran daerah. Data pengeluaran pemerintah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2000-2020 dan dinyatakan dalam Milyar Rupiah/Tahun.

3. PMDN (X2)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah total seluruh investasi di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri baik individu maupun perusahaan, dihitung

berdasarkan sektor ekonomi riil ditiap tahunnya. Data PMDN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2000-2020 dan dinyatakan dalam Milyar Rupiah/Tahun.

4. PMA (X3)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah total seluruh investasi di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik individu maupun perusahaan asing, dihitung berdasarkan sektor ekonomi riil ditiap tahunnya. Data PMA diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2000-2020 dan dinyatakan dalam Juta US\$/Tahun.